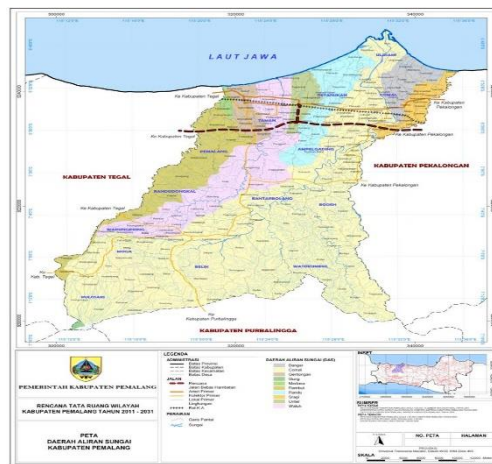


BAB II

Gambaran Umum

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara $109^{\circ} 17' 30'' - 109^{\circ} 40' 30''$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 52' 30'' - 7^{\circ} 20' 11''$ Lintang Selatan. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Secara administratif, Kabupaten Pemalang terdiri atas 14 kecamatan yakni Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Moga, Kecamatan Warungpring, Kecamatan Belik, Kecamatan Pulosari, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Bodeh, Kecamatan Comal, dan Kecamatan Ulujami. Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Pembagian wilayah tersebut menunjukkan karakteristik geografis, sosial dan ekonomi yang beragam, sehingga menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 2 .1 Peta Wilayah Kabupaten Pemalang

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2011

Dari 14 kecamatan, dua kecamatan terluas di Kabupaten Pemalang adalah Kecamatan Bantarbolang dengan luas wilayah 139,19 km² dan Kecamatan Watukumpul dengan luas 129,02 km², berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Pemerintahan Kabupaten Pemalang, 2025). Kecamatan Bantarbolang, yang terletak di barat daya kabupaten, memiliki keunggulan utama sebagai penghasil padi gogo terbesar di wilayah Pemalang berkat 44umpeng44 besar areanya yang berupa hutan, serta menjadi sentra produksi buah rambutan terbanyak, yang mendukung potensi agribisnis dan pariwisata alam seperti hutan jati yang luas. Sementara itu, Kecamatan Watukumpul, yang berada di wilayah selatan dan berbatasan dengan daerah pegunungan, unggul sebagai penghasil utama buah pisang serta berbagai komoditas perkebunan seperti kapok randu, kelapa, gelagah arjuna, kakao, dan nilam, dengan udara sejuk di ketinggian 450-600 mdpl yang membuatnya potensial untuk pengembangan pertanian tropis dan kerajinan 44umpe seperti sapu glagah, serta pasar terbesar di kecamatan yang menjadi pusat ekonomi masyarakat sekitar.

Kabupaten Pemalang memiliki topografi yang bervariasi. Bagian utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar 1-5 meter diatas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 meter diatas permukaan laut dan bagian selatan merupakan dataran tinggi dan pegunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Pemalang dilintasi dua sungai besar yaitu Sungai Waluh dan Sungai Comal yang menjadikan sebagian besar wilayah nya merupakan daerah aliran sungai yang subur. Dengan demikian Kabupaten Pemalang memiliki posisi yang strategis , baik dari sisi perdagangan maupun pemerintahan.

Kabupaten Pemalang memiliki visi “PEMALANG BERCAHAYA” (BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA) menggambarkan tekad teguh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang untuk periode 2025-2030 dalam membentuk kabupaten yang progresif dan berkesinambungan. Aspek Bersih menitikberatkan pada kebersihan alam serta pengelolaan pemerintahan yang jujur dan terbuka, diikuti Cakap yang merepresentasikan tenaga kerja superior yang inovatif serta kompetitif melalui optimalisasi jaringan nasional guna memaksimalkan sumber daya lokal. Handal menekankan kepemimpinan yang sinergis dan kokoh di antara eksekutif, legislatif, serta komunitas, sedangkan Mulya yang sekaligus menjadi fondasi RPJPD 2025-2045 menyatukan kemajuan yang visioner, superior, abadi, dan kultural untuk memanfaatkan optimal potensi alam, memperbaiki standar kehidupan, serta menjaga warisan budaya dan kebijaksanaan setempat demi

mencapai kesejahteraan yang inklusif, damai, dan berbasis spiritual bagi seluruh penduduk Pemalang.

Misi RHAPSODI (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas) berfungsi sebagai kerangka operasional utama untuk merealisasikan visi ini, dengan Resik yang berorientasi pada pembentukan norma kebersihan untuk melindungi mutu udara, air, serta tanah termasuk penanganan limbah; Hijau yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi hijau lewat industri berkelanjutan, pertanian ekologis, rantai nilai pertanian, wisata alam, dan UMKM berbasis daur ulang sampah; Apik yang menggarap infrastruktur inklusif dari tingkat desa hingga urban untuk pengaturan ruang yang optimal; Peduli yang membangun SDM berkualitas via peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, pembentukan karakter, keunggulan remaja, dan fasilitas olahraga; Silaturahmi yang menumbuhkan kemakmuran melalui semangat kolaboratif, saling menghargai, dan empati antarwarga; Organisatoris yang merealisasikan tata pemerintahan yang rapi, terorganisir, efisien, serta berorientasi pelayanan; Digitalisasi yang mengintegrasikan kemajuan teknologi untuk birokrasi modern dan pembentukan generasi kompetitif; serta Ikhlas yang merevitalisasi dimensi rohani, tradisi, bahasa, dan identitas budaya lokal guna menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi setiap lapisan masyarakat. Melalui visi dan misi ini, kepemimpinan Pemalang diantisipasi mampu menghasilkan perubahan holistik yang merata, kreatif, dan berfokus pada peningkatan kualitas hidup warga secara berkelanjutan (Pemalang.go.id, 2025).

2.1.1 Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pemalang disajikan sebagai berikut:

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Mogawaring	38.819	37.553	76.372
Warungpring	32.379	31.378	63.757
Pulorisi	63.210	60.751	123.961
Belik	34.153	31.858	66.011
Watukumpul	32.217	38.858	71.075
Bodeh	46.203	34.233	80.436
Randublatung	58.249	57.367	115.616
Pemalang	106.208	103.871	210.079
Taman	100.200	97.670	197.870
Petarukan	90.820	80.072	170.892
Comal	48.559	48.023	96.582
Ulujami	60.317	58.773	119.090
Total Kabupaten	711.334	680.407	1.391.741

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk

Sumber : pemalangkab.bps.go.id, telah diolah kembali oleh penulis (2025)

Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2024 mencapai total 1.391.741 jiwa, dengan rincian 711.334 laki-laki dan 680.407 perempuan. Distribusi penduduk per kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan, mencerminkan keragaman demografis di wilayah ini. Kecamatan Pemalang menduduki peringkat teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 210.079 jiwa,

terdiri dari 106.208 laki-laki dan 103.871 perempuan, menjadikannya pusat populasi utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Ulujami memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 96.582 jiwa, dengan komposisi 48.559 laki-laki dan 48.023 perempuan. Kecamatan Moga menyumbang 76.372 jiwa (38.819 laki-laki dan 37.553 perempuan), sementara Kecamatan Pulosari cukup besar dengan 123.961 jiwa (63.210 laki-laki dan 60.751 perempuan). Kecamatan Belik memiliki 66.011 jiwa (34.153 laki-laki dan 31.838 perempuan), dan Kecamatan Watukumpul mencatat 71.075 jiwa (32.217 laki-laki dan 38.838 perempuan). Kecamatan Bodeh menyumbang 80.436 jiwa (46.203 laki-laki dan 34.233 perempuan), sedangkan Kecamatan Randudongkal memiliki 115.616 jiwa (58.249 laki-laki dan 57.367 perempuan). Kecamatan Taman mencatat 197.870 jiwa (100.200 laki-laki dan 97.670 perempuan), Kecamatan Petarukan 170.892 jiwa (90.820 laki-laki dan 80.072 perempuan), Kecamatan Comal 119.090 jiwa (60.317 laki-laki dan 58.773 perempuan), dan Kecamatan Warungpring 63.757 jiwa (32.379 laki-laki dan 31.378 perempuan). Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah, tetapi juga faktor ekonomi, aksesibilitas, dan perkembangan infrastruktur di masing-masing kecamatan, yang secara keseluruhan membentuk dinamika sosial-ekonomi Kabupaten Pemalang.

2.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kabupaten Pemalang memiliki struktur ekonomi yang kokoh, ditopang oleh berbagai sektor yang beragam, dengan pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung utama yang mengandalkan komoditas unggulan seperti padi, jagung, ketela pohon, serta tanaman hortikultura seperti sayuran, bawang merah, cabai,

ketimun, dan buah-buahan seperti nanas, pisang, dan mangga. Potensi perkebunan teh juga menjadi sorotan dengan produksi sekitar 927,53 ton per tahun dari lahan seluas 15.713 hektare, sementara komoditas lain seperti tebu, kelapa, cengkeh, kopi, kakao, dan tembakau turut dikembangkan, memberikan nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi lokal maupun distribusi ke daerah lain, bahkan hingga pasar eksternal. Di samping itu, sektor perikanan memainkan peran penting mengingat letak geografis Pemalang yang berbatasan dengan laut, sementara perdagangan, industri kecil, dan jasa berkontribusi signifikan berkat posisi strategis di jalur pantura, menjadikan Pemalang sebagai daerah transit sekaligus pusat aktivitas ekonomi regional yang ramai. Dengan total penduduk 1.391.741 jiwa (711.334 laki-laki dan 680.407 perempuan) pada tahun 2024, Kecamatan Pemalang menonjol sebagai wilayah dengan populasi terbanyak mencapai 210.079 jiwa, sedangkan Kecamatan Warungpring tercatat memiliki penduduk tersedikit dengan 63.757 jiwa, mencerminkan distribusi demografis yang tidak merata.

Namun, di balik potensi besar ini, tantangan pembangunan sosial-ekonomi tetap menjadi perhatian utama, termasuk pemerataan pembangunan antar kecamatan, pengentasan kemiskinan yang masih menjadi isu krusial, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta peningkatan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Infrastruktur yang belum merata, akses terhadap teknologi modern, dan investasi yang terbatas di beberapa wilayah pedesaan menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, mulai dari pengembangan infrastruktur, pemberdayaan

petani dan nelayan, hingga promosi produk lokal melalui pameran dan platform digital. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global.

Dari aspek fasilitas sosial, bidang kesehatan di Kabupaten Pemalang relatif memadai dengan adanya 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 3 rumah sakit swasta, 22 Puskesmas induk, 65 Puskesmas pembantu, 22 unit Puskesmas keliling, serta tenaga medis yang tersebar di seluruh kecamatan, memastikan layanan kesehatan dapat dijangkau oleh mayoritas penduduk. Dalam bidang pendidikan, tersedia 350 Taman Kanak-kanak, 2 Sekolah Luar Biasa, 868 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 161 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 37 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, 29 Sekolah Menengah Kejuruan, serta 3 perguruan tinggi, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fasilitas ini didukung oleh program peningkatan literasi dan pelatihan vokasional yang bertujuan menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan pasar kerja modern. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan ini tidak hanya mendukung stabilitas sosial-ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang, menjadikannya daerah yang terus berkembang di Jawa Tengah.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang berdiri sebagai pilar utama dalam membangun fondasi pendidikan yang berkualitas dan pelestarian warisan kebudayaan yang kaya di wilayah pantai utara Jawa Tengah ini. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Dindikbud tidak hanya bertugas mengelola sistem pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah, tetapi juga memajukan seni, budaya, dan tradisi lokal yang menjadi identitas masyarakat Pemalang. Dengan komitmen yang kuat terhadap pembangunan manusia yang holistik, Dindikbud berupaya menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, adaptif terhadap perubahan zaman, dan bangga akan akar budayanya. Lokasinya yang strategis di Kabupaten Pemalang, yang dikenal dengan potensi pertanian, perikanan, dan industri kecil-menengah, menjadikan peran Dindikbud semakin krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.

Visi Dindikbud Kabupaten Pemalang, yang dirangkum dalam slogan inspiratif “PEMALANG BERCAHAYA”, mencerminkan aspirasi besar untuk menjadikan daerah ini sebagai mercusuar kemajuan di tengah hiruk-pikuk globalisasi. Visi ini dielaborasi melalui empat nilai inti: BERSIH, yang menekankan kebersihan fisik dan moral; CAKAP, yang berfokus pada kecakapan dan kompetensi; HANDAL, yang menjamin ketangguhan dan keandalan; serta

MULYA, yang menggarisbawahi kemuliaan nilai-nilai luhur. Secara keseluruhan, visi ini bertujuan mewujudkan Pemalang sebagai kabupaten yang bersinar melalui pendidikan inklusif dan kebudayaan yang hidup, di mana setiap warga merasakan manfaat dari lingkungan belajar yang aman, inovatif, dan berorientasi pada masa depan. Implementasi visi ini terlihat dalam berbagai program, seperti peningkatan infrastruktur sekolah ramah lingkungan, pelatihan guru berbasis teknologi, dan festival budaya tahunan yang melibatkan komunitas secara luas, sehingga menciptakan harmoni antara kemajuan modern dan pelestarian tradisi.

Misi Dindikbud diformulasikan secara kreatif melalui akronim RHAPSODI, yang bukan sekadar singkatan, melainkan sebuah simfoni aksi nyata untuk transformasi daerah. Resik, misalnya, melibatkan inisiatif menciptakan budaya dan lingkungan bersih melalui kampanye sekolah hijau, di mana siswa diajarkan tanggung jawab lingkungan sejak dini, mengurangi sampah plastik dan mempromosikan daur ulang sebagai bagian dari kurikulum. Hijau menargetkan Pemalang sebagai kawasan sejuk dan nyaman dengan mendorong industri hijau berkelanjutan, seperti integrasi pendidikan vokasi yang selaras dengan ekonomi ramah lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan alam. Apik merefleksikan pengelolaan wilayah yang baik dan ramah, di mana Dindikbud memfasilitasi pemerintahan sekolah yang transparan, efisien, dan akomodatif terhadap kebutuhan beragam siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus. Peduli menekankan pemerintahan yang kuat, cerdas, dan milik semua lapisan masyarakat, melalui program beasiswa inklusif dan dialog komunitas untuk

memastikan akses pendidikan merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga elite.

Lebih lanjut, Silaturahmi bertujuan membangun masyarakat rukun, guyub, gotong royong, tepa selira, dan sejahtera, dengan kegiatan seperti pertemuan budaya lintas desa yang memperkuat ikatan sosial dan mengurangi konflik potensial melalui pendidikan karakter berbasis nilai Jawa. Organisatoris menjamin pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani, dan mengayomi, diwujudkan melalui sistem manajemen pendidikan berbasis data yang memantau kinerja sekolah secara real-time. Digitalisasi menjadi kunci utama, di mana Dindikbud memanfaatkan teknologi informasi untuk memajukan kualitas masyarakat, seperti platform e-learning yang membuat pembelajaran aksesibel bahkan di pelosok pedesaan, melatih generasi pintar yang kompetitif di era Industri 4.0. Akhirnya, Ikhlas menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan lokal, bahasa, dan budaya Pemalang untuk semua kalangan, melalui kurikulum yang mengintegrasikan cerita rakyat, seni tradisional seperti tari topeng dan gamelan, serta pengajaran bahasa daerah untuk menjaga identitas di tengah arus global.

Motto Dindikbud, “Santun, Amanah, Profesional”, menjadi kompas etis dalam setiap tindakan. Santun mengajak sikap sopan dan hormat dalam interaksi, Amanah menjamin integritas dan kepercayaan publik, sementara Profesional menuntut standar tinggi dalam pelayanan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi jargon, melainkan panduan operasional yang diterapkan dalam rekrutmen pegawai, evaluasi program, dan interaksi dengan stakeholder. Melalui pendekatan holistik ini, Dindikbud Pemalang terus berkontribusi pada pembangunan daerah yang

berkelanjutan, di mana pendidikan dan kebudayaan menjadi perekat persatuan. Dengan demikian, Dindikbud bukan hanya lembaga administratif, melainkan katalisator harapan bagi ribuan anak muda Pemalang, memastikan cahaya kemajuan terus menyinari masa depan mereka rakyatnya (Dinas Pendidikan Pemalang, 2025).

2.3 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Kabupaten Pemalang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang berperan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dengan tugas utama membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada sektor tersebut. Sebagai lembaga strategis, Bappeda bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan dukungan teknis yang mendukung pembangunan berkelanjutan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis tersebut. Selain itu, Bappeda juga melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkupnya, dan menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait langsung dengan tugas dan fungsinya. Keberadaan Bappeda ini krusial dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang holistik, memastikan bahwa setiap kebijakan daerah selaras dengan visi nasional dan aspirasi lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ketahanan lingkungan di Kabupaten Pemalang.

Sejarah Bappeda Kabupaten Pemalang dimulai sejak pembentukannya pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Pemalang, yang menandai komitmen awal pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan di era otonomi desa. Penataan organisasi terbaru dilakukan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, yang mengatur struktur secara lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan kontemporer. Struktur organisasi Bappeda mencakup Kepala Badan sebagai pemimpin utama, Sekretariat yang terdiri dari Subbagian Keuangan untuk pengelolaan anggaran, Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk administrasi sumber daya manusia, serta Subbagian Koordinator Bina Program untuk sinkronisasi kegiatan. Selanjutnya, terdapat empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang fokus pada pengembangan SDM dan tata kelola pemerintahan; Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang mengelola aspek ekonomi hijau dan pemanfaatan sumber daya alam; Bidang Sosial dan Budaya yang menangani isu kesejahteraan sosial serta pelestarian budaya lokal; serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang merencanakan pembangunan fisik dan pengelolaan wilayah. Pendukung lainnya meliputi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian dan Pengembangan untuk inovasi berbasis riset, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang memperkaya keahlian spesifik. Struktur ini memungkinkan Bappeda beroperasi secara efisien, dengan koordinasi yang ketat

antarunit untuk menghasilkan rencana pembangunan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan ekonomi di wilayah pantai utara Jawa Tengah.

Visi Bappeda Kabupaten Pemalang, yaitu “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang,” mencerminkan komitmen untuk menciptakan proses perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Visi ini menjadi panduan strategis dalam menghadapi era pasca-pandemi, di mana pembangunan harus inklusif dan adaptif terhadap teknologi digital serta isu global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara itu, misi Bappeda dirumuskan dalam lima poin utama yang saling melengkapi: pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan informasi akurat melalui penguatan sistem informasi geografis dan analisis big data; kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program; ketiga, mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap aspek perencanaan, seperti prioritas energi terbarukan dan konservasi lahan pertanian; keempat, memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang lebih inklusif, termasuk suara perempuan, pemuda, dan kelompok rentan; serta kelima, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Dengan visi dan misi ini, Bappeda tidak hanya berfungsi

sebagai perencana, melainkan juga katalisator transformasi yang memastikan Kabupaten Pemalang maju sebagai daerah mandiri, adil, dan sejahtera, di mana setiap rencana pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyatnya (BAPPEDA, 2025).

2.4 Gambaran Umum PKBM Kabupaten Pemalang

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk, dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri untuk memberikan kesempatan belajar bagi warga yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai kendala seperti faktor ekonomi, usia, jarak tempat tinggal, atau keterbatasan waktu. PKBM bertujuan menyediakan layanan pendidikan sepanjang hayat agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang mendukung kemandirian dan peningkatan kualitas hidup. Program utama yang diselenggarakan meliputi pendidikan kesetaraan, yaitu Program Paket A yang setara dengan SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA, di mana standar kelulusan dan ijazahnya sama dengan pendidikan formal, namun proses belajarnya lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dewasa, serta menggunakan pendekatan andragogi yang berpusat pada peserta dan berbasis kehidupan sehari-hari. Selain itu, PKBM juga menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat yang belum bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta berbagai kursus keterampilan atau life skills sesuai potensi dan kebutuhan daerah setempat, seperti menjahit, tata boga, pertanian, komputer, atau kewirausahaan. Dengan demikian, PKBM tidak hanya berfungsi sebagai sekolah

alternatif bagi yang terlewat pendidikan formal, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran komunitas dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri, terampil, dan mampu menghadapi perubahan sosial-ekonomi di lingkungannya.

1. PKBM Putra Bangsa

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putra Bangsa merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang berada di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kandang RT 14 RW 03, Kecamatan Comal. Lembaga ini didirikan pada tanggal 23 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan dengan nomor 437/214/2012 di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan status swasta dan NPSN P2962553. PKBM Putra Bangsa fokus pada penyediaan layanan pendidikan kesetaraan, meliputi Program Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA/SMK), yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan formal karena berbagai kendala seperti usia, ekonomi, waktu, atau kondisi geografis. Selain pendidikan kesetaraan, lembaga ini juga mengembangkan program pengembangan keterampilan hidup (life skill) dan kewirausahaan, seperti pelatihan barista, komputer, otomotif, serta keterampilan mengemudi mobil, guna meningkatkan kemampuan mandiri dan daya saing masyarakat di wilayah sekitar. PKBM Putra Bangsa telah menjadi rujukan dalam pengelolaan pendidikan nonformal, sebagaimana ditunjukkan melalui kegiatan study banding dari PKBM lain dan monitoring program penanganan anak tidak sekolah (ATS) bersama instansi terkait, sehingga berkontribusi signifikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa di

tingkat lokal Kabupaten Pemalang (Profil Singkat Lembaga PKBM Putra Bangsa, 2015)

2. PKBM Iqro

PKBM Iqro merupakan salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Warungpring. Lembaga ini berstatus swasta dengan NPSN P9908255 dan terdaftar di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial IQRO Warungpring Pemalang, berlokasi di Jl. Raya Warungpring – Pakembaran, Desa Warungpring. PKBM Iqro didirikan pada tanggal 30 Maret 2007 berdasarkan SK Pendirian Nomor 437/392/2007 dari Kementerian Pendidikan, dan saat ini memiliki akreditasi B. Sebagai satuan pendidikan nonformal, PKBM ini fokus pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B, dan Paket C, serta kemungkinan program keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat lainnya, sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah pedesaan dan sekitarnya di Kabupaten Pemalang. Lembaga ini turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan, guna meningkatkan akses pendidikan bagi warga yang tidak dapat mengikuti jalur formal. Kepala sekolah saat ini adalah Ari Yuliyani Rukmana, dan PKBM Iqro menjadi bagian dari jaringan sekitar 15 PKBM swasta yang tersebar di Kabupaten Pemalang untuk mendukung pendidikan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat.

2.5 Kebijakan Program Njuh Sekolah Maning Dalam Penganggulan Anak Tidak Sekolah

Program Njuh Sekolah Maning (NSM) merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dirancang untuk menuntaskan pendidikan dasar 12 tahun dan menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), dengan fokus pada anak usia 7–18 tahun yang terdiri dari tiga kategori utama: belum pernah sekolah, putus sekolah di tengah jalan, dan lulus tapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya (Pemalang, 2021; Dinas Pendidikan Pemalang, 2021). Program ini, yang berarti “Ayo Sekolah Lagi” dalam bahasa Jawa, pertama kali diinisiasi pada tahun 2021 sebagai piloting di lima desa, yaitu Sikayu, Karangasem, Randudongkal, Sitemu, dan Jojogan. Pada tahap awal, tim berhasil mendata 278 ATS dari 2.428 kepala keluarga yang mencakup 9.761 jiwa, dengan alasan utama putus sekolah meliputi faktor ekonomi, kemalasan, pernikahan dini, membantu orang tua, dan akses sekolah yang sulit (Dinas Pendidikan Pemalang, 2021; Pemalang Pikiran-Rakyat, 2021).

Secara konstitusional, NSM selaras dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan dan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar (Indonesia, 1945). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2), memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin wajib belajar bagi anak usia 7–15 tahun (Indonesia, 2003). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menjadi acuan untuk memastikan anak-anak kembali ke jalur pendidikan formal maupun nonformal

(Indonesia, 2008). Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rintisan Penuntasan Pendidikan 12 Tahun, didukung Keputusan Bupati Nomor 188.4/576/Tahun 2021, memberikan landasan langsung untuk pendataan komprehensif ATS, pemberian beasiswa, fasilitas pendidikan, dan pendampingan sosial (Pemalang, 2021).

Program NSM juga mendukung target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) (Bappenas, 2020), serta sinkronisasi dengan data Pusat Data dan Informasi Pendidikan (PUSDATIN). Peluncuran resmi NSM dilakukan pada 25 Januari 2022, bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Pemalang ke-447, di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemalang (Jatengprov.go.id, 2022). Kolaborasi awal dilakukan dengan UNICEF yang membawa konsep program untuk menekan ATS, kemudian diperluas melalui kemitraan dengan Baznas, Bank Jateng, LSM seperti Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP), serta perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) (Beritakeadilan.com, 2022)

Implementasi di lapangan dimulai dengan sosialisasi intensif, seperti di Desa Sikayu pada 5 Oktober 2021, di mana Person In Charge (PIC) Ikmaludin Aziz memaparkan upaya penanganan ATS berdasarkan data Susenas BPS 2019. Sosialisasi melibatkan Ketua RT, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Babin Kantibmas, dengan alokasi dana desa mulai 2022 untuk mendukung program

(Pemalangkab.go.id, 2021). Pada tahun 2022, NSM diperluas ke 25 desa di lima kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti Watukumpul, Belik, Moga, Bantarbolang, dan Petarukan melalui sosialisasi di Ruang Rapat Bappeda pada 10 Maret 2022, yang menargetkan pembentukan tim desa, pelatihan, dan pendataan ATS untuk mengembalikan mereka ke sekolah formal atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Pemalangkab.go.id, 2022).

Di Kecamatan Petarukan, misalnya, dari 354 ATS yang terdata, 166 anak berhasil kembali bersekolah melalui jalur nonformal di PKBM dengan dukungan modul gratis, beasiswa, dan pelatihan keterampilan seperti barista atau otomotif (Dinas Pendidikan Pemalang, 2023). Sementara itu, di lima desa uji coba awal 2021, 26 anak dari 278 ATS berhasil kembali ke sekolah formal melalui pendataan berbasis desa, sosialisasi via balai desa dan media sosial, serta keterlibatan tim lintas sektor dan komunitas peduli pendidikan (Dinas Pendidikan Pemalang, 2021; Mediakita.co, 2022). Hingga akhir 2021, data menunjukkan 267 ATS teridentifikasi di empat desa survei dan satu desa replikasi, dengan 17 belum pernah sekolah, 68 putus di tengah, dan 182 tidak melanjutkan, yang kemudian disalurkan ke PKBM atau sekolah formal dengan edukasi dari KMPP (Ejournal3 Undip, 2021).

Pada 2023, upaya NSM semakin digalakkan dengan kolaborasi pihak desa, PKBM, kecamatan, kader desa, Karang Taruna, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Program berhasil mengembalikan 4.270 ATS ke sekolah dari total 9.123 ATS usia 7–19 tahun, dengan target 5.000 pada akhir tahun dan sisanya pada 2024. Prioritas anggaran difokuskan untuk mengatasi faktor seperti kesulitan ekonomi dan ketidakpahaman orang tua (Pantura Suaramerdeka, 2023). Update 2024

menunjukkan integrasi NSM dengan Program GEMA PAUD (Gerakan Maring PAUD) untuk anak usia 5–6 tahun, melalui kegiatan advokasi ATS pada 1 Juli 2024 di Gedung PGRI Pemalang, diinisiasi BBPMP Provinsi Jawa Tengah, di mana Kepala Dinas Pendidikan Ismun Hadiyo menekankan percepatan penanganan dan sinkronisasi data, pemaparan data ATS, penyebab seperti ekonomi dan kurangnya pemahaman PAUD, serta capaian seperti Angka Kelangsungan Sekolah (AKS), APS SD/SMP, dan APK SMA 2023 (BBPMP Jateng, 2024). Diskusi kelompok menghasilkan rekomendasi seperti validasi data ATS, optimalisasi NSM, peningkatan mutu PKBM, kampanye bersekolah, bimtek validasi data, dan sosialisasi PPDB SMA/SMK jalur afirmasi.

Evaluasi dari penelitian Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa meskipun program memberikan kepuasan bagi peserta melalui beasiswa (Rp1.000.000 untuk SD, Rp1.250.000 untuk SMP, Rp1.500.000 untuk SMA) dan fleksibilitas PKBM, keberhasilan belum maksimal karena hanya 26 dari 278 ATS kembali sekolah pada 2021. Tantangan mencakup rendahnya kesadaran masyarakat, efisiensi biaya rendah (anggaran pendataan Rp3.000 per KK), kendala akses PKBM seperti jalan rusak di PKBM Sanggar 21, dan cakupan yang terbatas hanya di lima desa awal (Ejournal3 Undip, 2021). Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi melalui pemerintah desa, transparansi pembiayaan, perluasan ke lebih banyak desa untuk pemerataan, dan menampilkan contoh nyata keberhasilan untuk membangun keterbukaan masyarakat.

Dukungan pendanaan meliputi APBD sebesar Rp80 miliar pada 2023 untuk penanganan ATS, kolaborasi dengan Baznas, Bank Jateng, LSM, dan CSR, serta

tim koordinasi lintas OPD seperti Bappeda dan Dinas Pendidikan, ditambah dukungan tokoh masyarakat untuk keberlanjutan. Infrastruktur informasi digital dimanfaatkan untuk sosialisasi, sementara sekolah menciptakan lingkungan belajar inklusif, dengan rencana ekspansi ke 25 desa awal dan target mencakup 9% dari 223 desa di Pemalang (Pantura Suaramerdeka, 2023).

Secara keseluruhan, NSM merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menuntaskan pendidikan dasar, dengan landasan hukum kuat dan implementasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program ini telah menyekolahkan kembali puluhan hingga ribuan anak sejak 2021, meskipun evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas, cakupan, dan kesadaran masyarakat agar dampaknya lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pemalang pada tahun 2025 dan seterusnya. Perkembangan implementasi kebijakan hingga akhir 2025 pun menunjukkan hasil konkret yang menggembirakan.

Perkembangan implementasi kebijakan hingga akhir 2025 menunjukkan hasil konkret. Berdasarkan rekap resmi Dindikpora Kabupaten Pemalang (cut off November 2025), total ATS yang berhasil dikembalikan ke pendidikan formal dan non-formal sejak 2021 mencapai 13.551 anak, dengan rincian tahunan sebagai berikut: 26 anak (2021), 185 anak (2022), 3.136 anak (2023), 3.013 anak (2024), dan puncak tertinggi 7.191 anak pada 2025 (83 formal + 7.108 non-formal). Mayoritas pengembalian terjadi melalui jalur non-formal di PKBM, yang menjadi instrumen utama program dalam menjangkau anak rentan di wilayah pesisir dan pegunungan.